

**Judul** : Saatnya Mencari Solusi Atasi Perekonomian Indonesia  
**Tanggal** : Rabu, 26 Agustus 2015  
**Surat Kabar** : Suara Pembaruan  
**Halaman** : A7

Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) meminta Pemerintah untuk tak selalu menyalahkan kondisi perekonomian global yang kurang beres akibat, sehingga berdampak pada terpuruknya perekonomian nasional. Kini sudah saatnya, baik DPR RI maupun Pemerintah untuk mencari solusi terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

**WAKIL** Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, untuk membahas kondisi ekonomi terkini, sekaligus membahas persiapan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2016, Pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi bersama Pimpinan Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro beserta jajaran, Senin (24/08) malam.

"DPR dapat melihat dan memahami situasi ekonomi global saat ini, dimana laju pertumbuhan ekonomi sedang melambat. Tak dipungkiri juga, kondisi negara kita juga tidak lepas dari kondisi perekonomian global yang sedang berproses menuju keseimbangan baru yang *unpredictable*", tegas Taufik, usai memimpin Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Senayan, kemarin.

Taufik menambahkan, keseimbangan baru itu tidak akan mudah diprediksi. Kondisi *unpredictable* itu perlu diwaspadai. Bahkan, pengamat ekonomi sampai mengatakan situasi fluktuatif nilai tukar rupiah dikarenakan adanya *currency war* atau perang valuta asing. Namun ia mengingatkan, terpuruknya kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak boleh selalu dikatakan akibat dari kondisi ekonomi global atau eksternal yang sedang melambat, atau juga banyak negara mengalami hal yang sama dengan Indonesia.

"Sudah saatnya kita tidak membicarakan hal itu. Saatnya kita membicarakan apa solusinya terhadap kedaulatan NKRI, kemandirian bangsa, dan termasuk di dalamnya solusi situasi ekonomi yang masih terus mengalami pelambatan", tegas Politisi F-PAN itu.

Sementara terkait pembahasan RAPBN 2016, Taufik mengingatkan Pemerintah bahwa berbagai

## Saatnya Mencari Solusi Atasi Perekonomian Indonesia



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menerima Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap RUU APBN 2016

program yang diusulkan Fraksi-fraksi DPR yang telah disampaikan pada pekan lalu dalam Rapat Paripurna, menjadi bagian tak terpisahkan dari pembahasan RAPBN.

Pada prinsipnya, imbuh Taufik, pihaknya menyerahkan seluruhnya kepada Pemerintah, karena Pemerintah bisa dikatakan tidak dapat mengelak dari berbagai program Kementerian dan Lembaga, namun di sisi lain DPR perlu mengingatkan Pemerintah untuk menentukan program prioritas.

"Kita cari *resultan*, bagaimana program prioritas Pemerintah dapat terakomodir, di sisi lain aspek kehati-hatian menentukan kriteria program kerja disesuaikan dengan kondisi keuangan Pemerintah", ingat Politisi asal Dapil Jawa Tengah itu.

Taufik juga menyoroti pembahasan asumsi makro dalam RAPBN 2016 yang segera dibahas antara Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah. Ia memastikan, pasti nanti dilakukan penyesuaian

(*adjustment*) selama pembahasan. Khususnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

"Misalnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang awalnya dipatok Rp 13.400 per dolar AS, sekarang dolar sudah menyentuh di angka Rp 14.000 lebih, tentunya akan dilakukan *adjustment*, dan yang akan digunakan adalah *average* dalam 3 bulan terakhir, bukan *value* saat ini," tambah Taufik.

Demikian juga dengan besaran asumsi makro lain yang akan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini. Seperti laju pertumbuhan ekonomi yang akan dibahas di Komisi XI DPR dan lifting minyak dan gas yang akan dibahas di Komisi VII terlebih dahulu, yang kemudian baru dibahas di Badan Anggaran DPR bersama Pemerintah. Namun Taufik mengingatkan Pemerintah terkait besaran *gini ratio*, ia berharap tak melebar lagi.

"Semakin besar *gini ratio*, otomatis kesenjangan masyarakat yang kurang mampu dengan yang

mampu semakin lebar. DPR mengharap, Pemerintah jangan terfokus pada asumsi makro saja, tapi juga harus bisa kendalikan angka *gini ratio*. Semakin besar kesenjangan sosial dan ekonomi, ini bisa menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat. *Gini ratio* juga mesti diperhatikan", ingat Taufik.

Di satu sisi, Taufik mengapresiasi Pemerintah yang sudah mengajukan angka besaran ekonomi yang sudah sesuai dengan market saat ini. Namun ia tak memungkiri, usulan Pemerintah akan berubah, sesuai dengan dinamika pembahasan dengan DPR dan kesepakatan pada ekonomi yang tidak bersahabat.

"Kami apresiasi Pemerintah yang sudah menempatkan

asumsi makro mendekati nilai *market*. Sebelumnya, *gap* antara *real market* dengan asumsi makro terlalu jauh. Sekarang sudah semakin mendekati *real market*", kata Taufik sembari mengatakan pembahasan RAPBN 2016 dengan DPR akan berlangsung hingga bulan Oktober 2016.

### PEREKONOMIAN GLOBAL SEMAKIN MEMBAIK

Menkeu mengatakan, pada tahun 2016, kinerja perekonomian global diperkirakan akan mengalami peningkatan dari tahun 2015. Prospek membaiknya perekonomian global tersebut diperkirakan akan turut mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi

nasional. Demikian dikatakan saat memberikan jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi DPR terhadap RAPBN 2016 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna, kemarin.

"Target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2016, sebesar 5,5 persen berada pada batas bawah rentang pertumbuhan ekonomi, sesuai kesepakatan dalam pembahasan pendahuluan RAPBN 2016 sebesar 5,5 sampai 6 persen. Namun demikian, Pemerintah akan tetap responsif dalam melihat perkembangan perekonomian aktual dan akomodatif dalam menampung berbagai masukan dalam proses pembahasan dengan DPR", kata Menkeu.

Terkait nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Menkeu mengatakan, Pemerintah dan Bank Indonesia tidak pernah berdiam diri untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah, seperti yang dihadapi juga oleh mata uang negara lainnya terhadap dolar AS.

"Kita menyadari bahwa stabilitas nilai tukar rupiah perlu dijaga agar tidak berdampak luas terhadap aspek perekonomian nasional. Dalam RAPBN 2016, diperkirakan rata-rata nilai tukar rupiah akan mencapai Rp 13.400 per dolar AS, yang didasarkan pada rentang nilai tukar yang paling maksimum disepakati Pemerintah dan BI dengan DPR pada bulan Juni 2015," jelas Menkeu.

Menkeu memastikan, kondisi aktual yang terjadi saat ini di pasar mata uang nasional dan global, pasti akan diperhitungkan DPR, Pemerintah, dan Bank Indonesia dalam pembahasan RAPBN 2016 yang lebih dalam di Komisi XI dan Badan Anggaran DPR sampai dengan bulan Oktober 2015 sebagai batas akhir penetapan UU APBN 2016. (sf)

DPR DAPAT MELIHAT DAN MEMAHAMI SITUASI EKONOMI GLOBAL SAAT INI, DIMANA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI SEDANG MELAMBAT. TAK DIPUNGKIRI JUGA, KONDISI NEGARA KITA JUGA TIDAK LEPAS DARI KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL YANG SEDANG BERPROSES MENUJU KESEIMBANGAN BARU YANG UNPREDICTABLE.

Taufik Kurniawan Wakil Ketua DPR RI



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan